

PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH  
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

# PROVINSI SULAWESI BARAT







## **Peta Pembinaan Provinsi Sulawesi Barat**

Jakarta: Bina Praja Press, 2022  
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo  
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press  
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbangkemendagri.com  
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **TIM PENULIS**

**Pengarah:**

Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal

**Penanggungjawab:**

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri  
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

**Penulis:**

1. Herdina Kuswari, S.Stat
2. Drs. Awan Yanuarko, M.Si

## **SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala Badan Strategi  
Kebijakan Dalam Negeri  
Kemendagri

**Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd**

## **SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH**

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

**Drs. Aferi S. Fudail, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

## **BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA**

A. KABUPATEN MAJENE	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN MAMASA	13
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN MAMUJU	24
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	25
Aspek Satuan Inovasi Daerah	26
D. KABUPATEN MAMUJU TENGAH	32
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	33
Aspek Satuan Inovasi Daerah	34
E. KABUPATEN MAMUJU UTARA	40
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	40
Aspek Satuan Inovasi Daerah	41
F. KABUPATEN POLEWALI MANDAR	47
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	48
Aspek Satuan Inovasi Daerah	49

## **BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 01. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Majene
- Gambar 02. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Majene
- Gambar 03. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Majene
- Gambar 04. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Majene
- Gambar 05. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Majene
- Gambar 06. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Majene
- Gambar 07. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Majene
- Gambar 08. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Majene
- Gambar 09. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Majene
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Majene
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mamasa
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamasa
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamasa
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamasa
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamasa
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamasa
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Mamasa
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamasa

Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamasa

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamasa

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamuju

Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamuju

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamuju

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamuju

Gambar 27. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamuju

Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mamuju

Gambar 29. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamuju

Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamuju

Gambar 31. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju

Gambar 32. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 33. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 34. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 37. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 39. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 41. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 42. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 43. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 44. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 45. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 48. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 50. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamuju Utara

Gambar 52. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 53. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 54. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 56. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 57. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 59. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 61. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 62. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Majene beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Mamasa beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju Tengah beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Polewali Mandar beserta Skor Kematangannya

# ***BAB I***

---

## ***PENDAHULUAN***





## A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman [indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id](https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id). Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

## **B. MANFAAT**

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

## **C. TUJUAN**

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), dan Kabupaten Polewali Mandar.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
Roadmap SiDA		
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
		Kecanggihan Produk
	Online Sistem	
	Kecepatan Inovasi	
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah

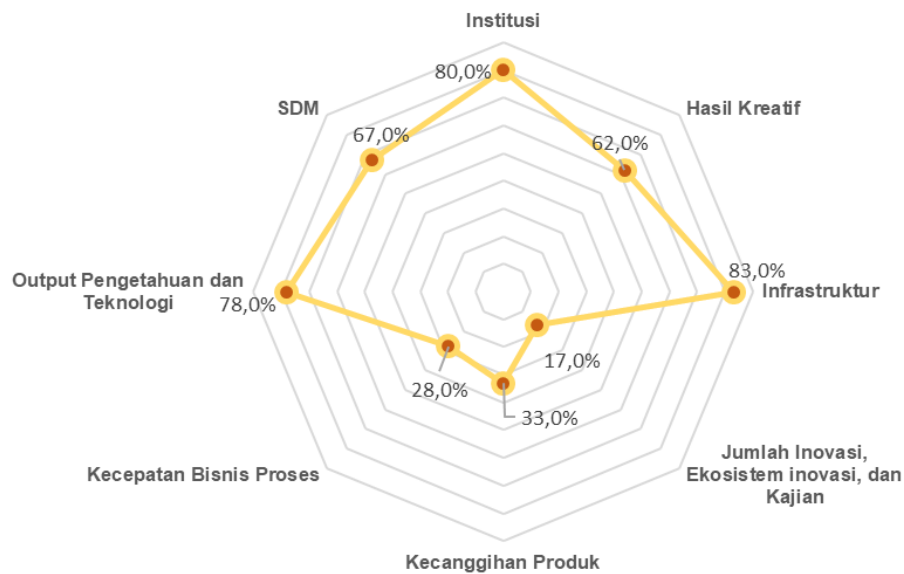
# **BAB II**

---

**INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN  
DAN KLASTER KOTA**



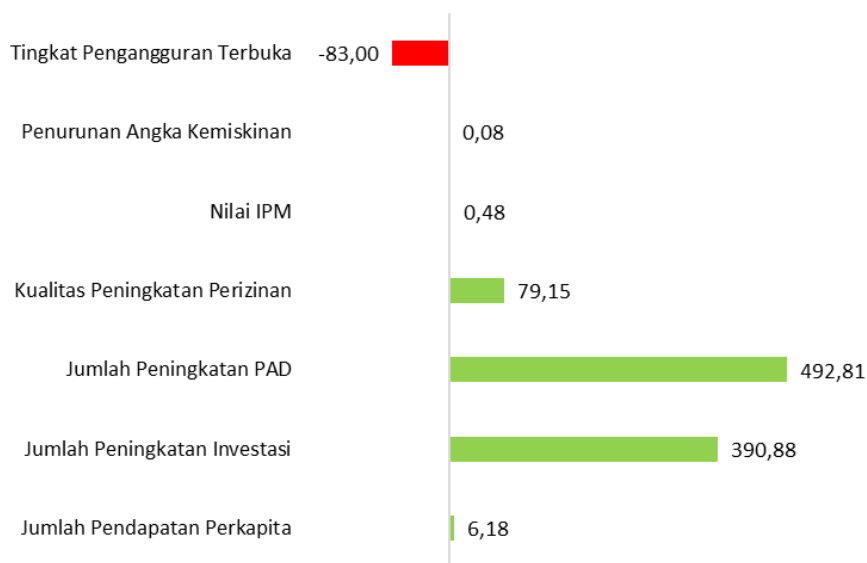
## A. KABUPATEN MAJENE



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Majene

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Majene memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 83,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 17,0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



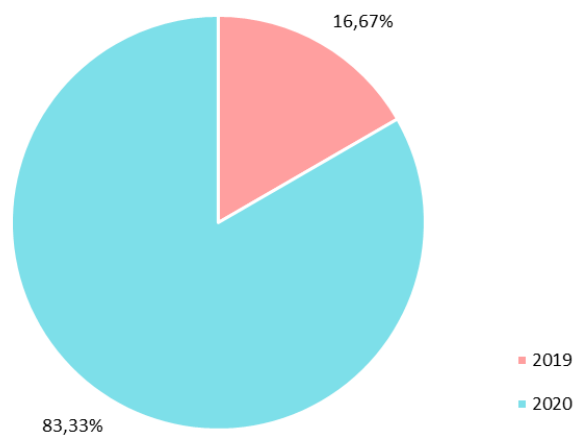
Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Majene

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Capaian aspek satuan pemerintah daerah Kabupaten Majene diilustrasikan dalam Gambar 2. Indikator jumlah peningkatan PAD menjadi indikator dengan capaian tertinggi yakni mencapai 492,81% dan disusul oleh indikator jumlah peningkatan inovasi mencapai 390,88%. Selain dua indikator tersebut, indikator kualitas peningkatan perizinan dan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Majene juga meningkat dengan capaian sebesar 79,15% dan 6,18%.

Indikator penurunan angka kemiskinan dan IPM tidak mengalami perubahan yang signifikan karena capaian dari dua indikator tersebut tidak mencapai 1%. Aspek satuan pemda Kabupaten Majene yang mengalami penurunan paling tinggi adalah tingkat pengangguran terbuka. Indikator ini mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni sebesar 83%. Secara umum, aspek satuan pemerintah daerah di Kabupaten Majene mengalami perkembangan yang cukup signifikan jika dilihat dari indikator-indikator yang sudah diuraikan di atas.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

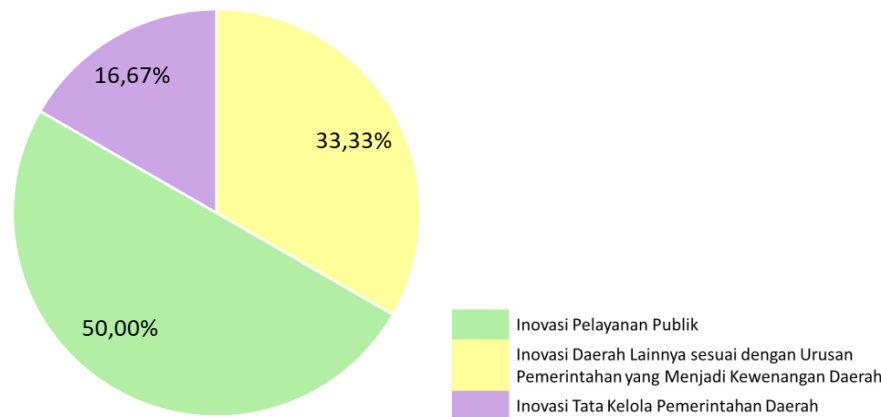


Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Majene

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Majene telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 1 (16,67%) inovasi dari 6 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 5 (83,33 %) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.



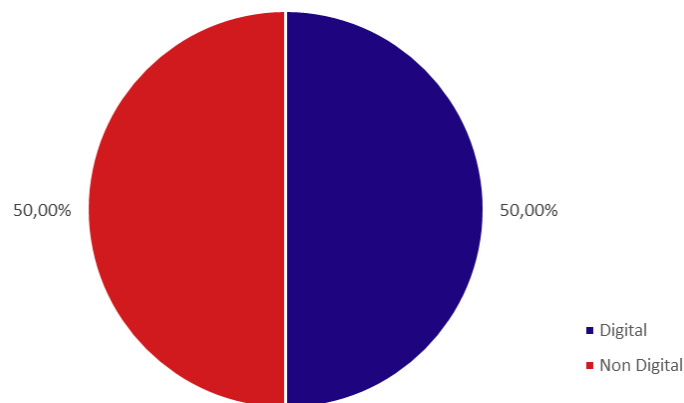
## b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Majene

Lima puluh persen inovasi di Kabupaten Majene merupakan inovasi pelayanan publik dengan total jumlah inovasi sebanyak 6 inovasi. Sedangkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah hanya 16,67%. Sisa 33,33% dari total inovasi di Majene merupakan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

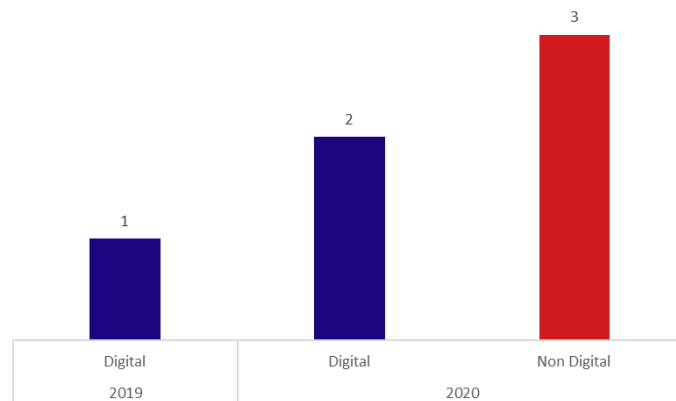
## c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Majene

Inovasi di Kabupaten Majene pada tahun penilaian 2021 terdiri dari 50% inovasi digital dan 50% lainnya inovasi non digital.

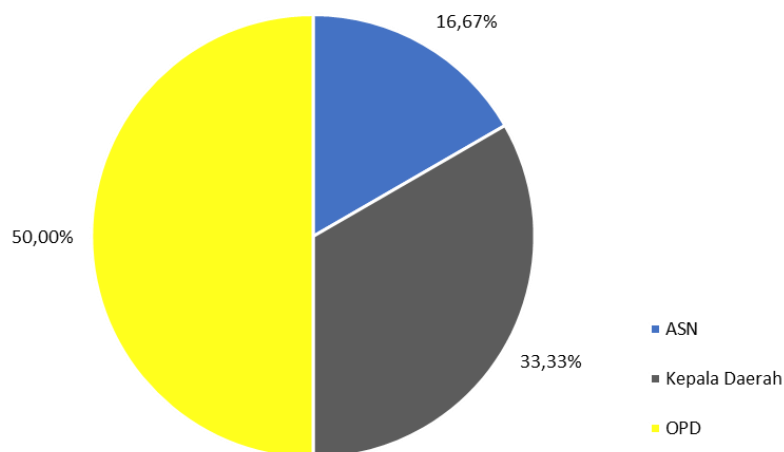
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Majene

Inovasi di Kabupaten Majene pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari satu inovasi digital pada tahun 2019 menjadi 2 inovasi digital dan 3 inovasi non digital.

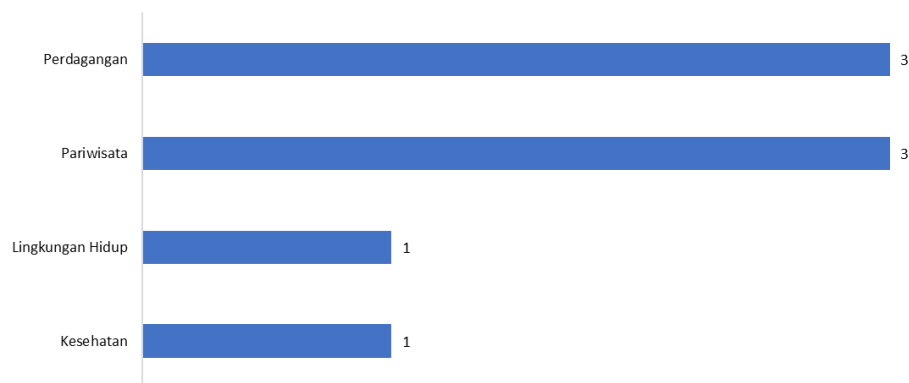
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Majene

Organisasi Perangkat Daerah menjadi inisiator terbesar pada tahun penilaian 2021 dengan inovasi yang diinisiasi oleh mereka sebesar 50% dari total inovasi. Sedangkan 33,3% dari inovasi diinisiasikan oleh Kepala Daerah dan sisa inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN di Kabupaten Majene. Sedangkan inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan pada tahun 2021.

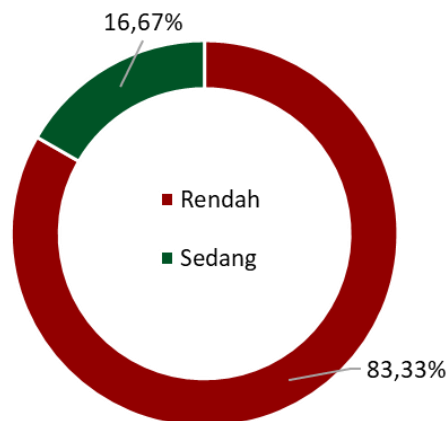
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Majene

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Majene berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari 4 urusan yakni Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Jumlah inovasi yang tercipta pada perdagangan dan pariwisata adalah masing-masing 3 inovasi. Sedangkan jumlah inovasi pada lingkungan hidup dan kesehatan adalah masing-masing 1 inovasi.

#### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



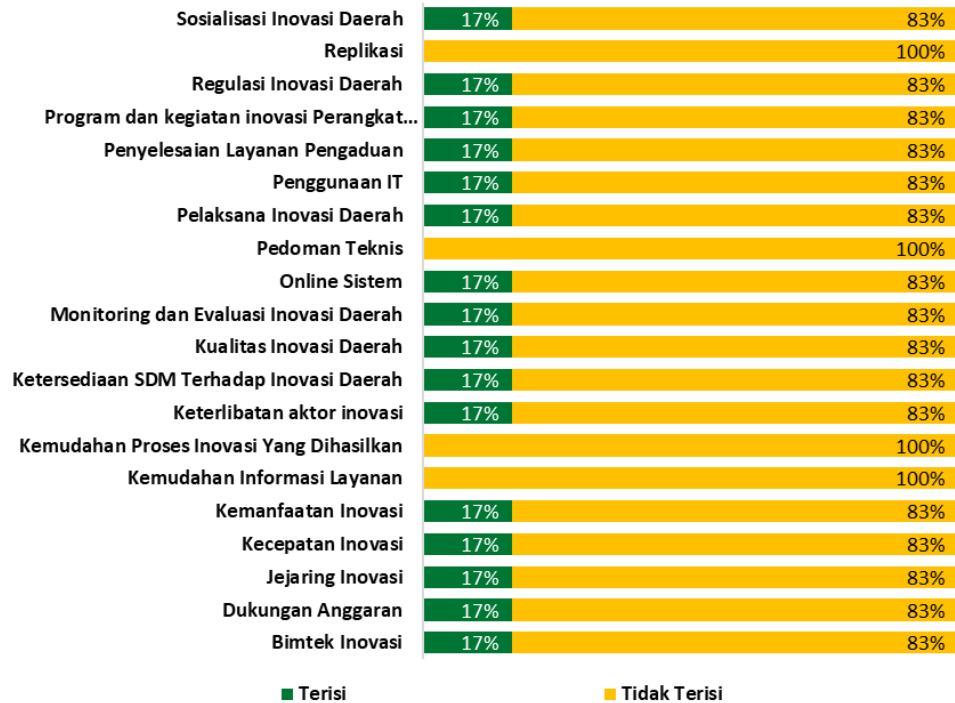
Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Majene

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, inovasi di Kabupaten Majene memiliki tingkat skor kematangan sedang dan rendah. Lima inovasi (83,33%) di Kabupaten Majene memiliki tingkat skor kematangan inovasi yang rendah atau skor di bawah 50. Sedangkan satu inovasi lainnya memiliki tingkat skor kematangan yang sedang dengan skor antara 50 – 100.

#### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Sebagian besar inovasi di Kabupaten Majene tidak didukung oleh data pendukung indikator satuan inovasi daerah, hal ini dapat dilihat dalam Gambar 10. Dari 6 inovasi yang

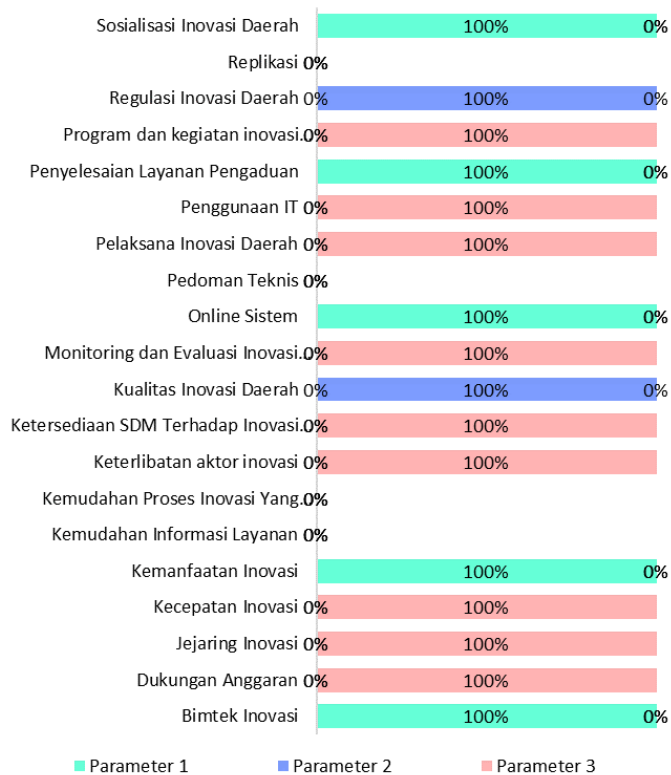
dilaporkan oleh Kabupaten Majene, hanya satu inovasi yang memiliki cukup banyak data pendukung. Indikator replikasi, pedoman teknis, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, dan kemudahan informasi layanan merupakan indikator-indikator yang 100% tidak terisi oleh data dukung. Sedangkan indikator lainnya hanya diisi oleh data dukung dari satu inovasi (17%).



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Majene

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dari satu inovasi yang melampirkan data dukung, terdapat 9 indikator yang data dukungnya termasuk dalam parameter 3. Indikator regulasi inovasi daerah dan kualitas inovasi daerah data dukungnya masuk dalam parameter 2. Selain itu, terdapat 5 indikator yang data dukungnya termasuk dalam parameter 1. Indikator replikasi, pedoman teknis, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, dan kemudahan informasi layanan merupakan indikator tidak terisi oleh data dukung.



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

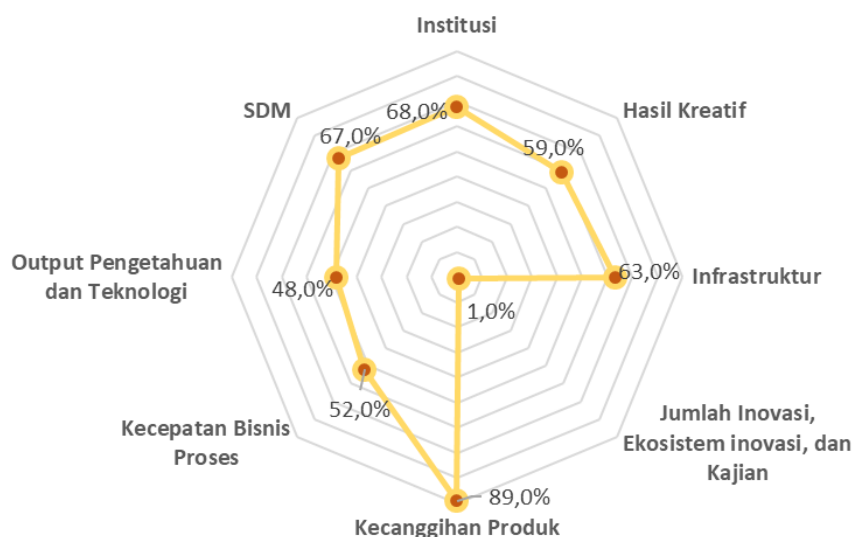
#### j. Daftar Inovasi Kabupaten Majene beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Majene beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pasar Mapaccing (Pasar yang Bersih dan Sehat)	0
Ayo Berwisata Aman Dari Covid 19	0
MARKET SEHAT (Mari Ke Toko Sehat Harga Aman Terjangkau)	0
RESTO MAPACGING (Rumah Makan Bersih, Sehat, Aman, Nyaman dan Tertib)	0
Resto NABI	0
Pelangi Dimatamu (Pengelolaan Sampah Dengan Inovasi Edukasi Replika ATM Sampah Serta Bank Sampah Murid) di Kabupaten Majene.	91

## B. KABUPATEN MAMASA

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah, Kabupaten Mamasa memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 89.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Kecanggihan Produk sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian sangat rendah, yaitu 1.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

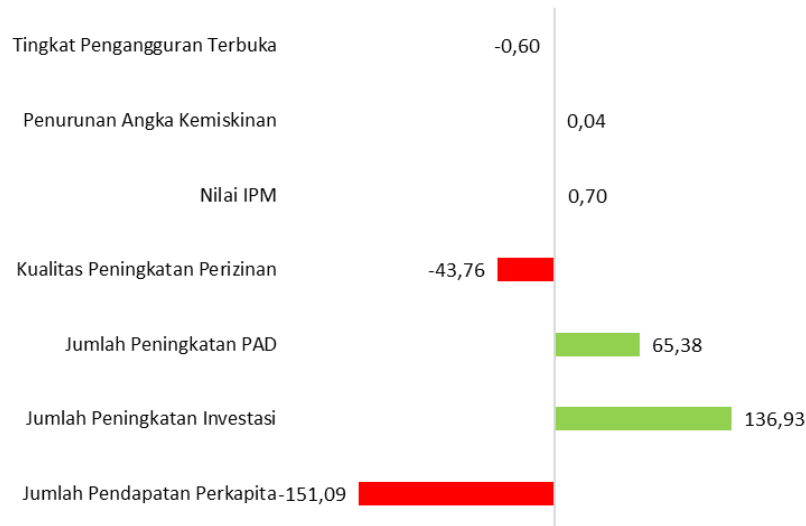


Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mamasa

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

Aspek satuan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa di dalam Laporan Inovasi Daerah tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang mengalami perkembangan yang positif tetapi terdapat pula indikator yang menunjukkan perkembangan ke arah negatif. Grafik capaian aspek satuan pemerintah daerah diilustrasikan dalam gambar 13. Di Kabupaten Mamasa, penurunan tingkat pengangguran terbuka tidak lebih masih berada di bawah standar nasional Indeks Inovasi Daerah. Capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamasa adalah sebesar 0.60%, lebih rendah 0.32% dibandingkan standar nasional yang berada di nilai 0.92%. Sedangkan indikator penurunan tingkat kemiskinan dan nilai IPM cenderung stagnan dengan capaian kurang dari 1%.

Indikator kualitas peningkatan perizinan di Kabupaten Mamasa mengalami penurunan yang cukup besar dengan persentase penurunan mencapai 43.76%. Penurunan kualitas peningkatan perizinan ini bersamaan dengan penurunan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Mamasa. Jumlah pendapatan perkapita di Kabupaten Mamasa pada laporan indeks inovasi tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 151.09%.

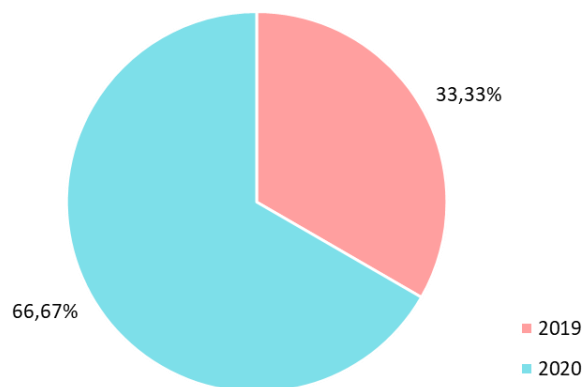


Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamasa

Indikator lainnya pada aspek satuan pemerintah daerah di Kabupaten Mamasa adalah jumlah peningkatan PAD dan jumlah peningkatan investasi. Dua indikator ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan capaian standar nasionalnya. Persentase indikator jumlah peningkatan PAD di Kabupaten Mamasa mencapai 65.38% dengan standar nasional hanya 8% menunjukkan bahwa jumlah peningkatan PAD di Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan yang signifikan. Selain indikator jumlah peningkatan PAD, jumlah peningkatan investasi di Kabupaten Mamasa juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan persentase capaian sebesar 136.93%. Capaian jumlah peningkatan investasi ini memiliki persentase yang cukup besar jika dibandingkan dengan standar nasionalnya yang hanya sebesar 0.45%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

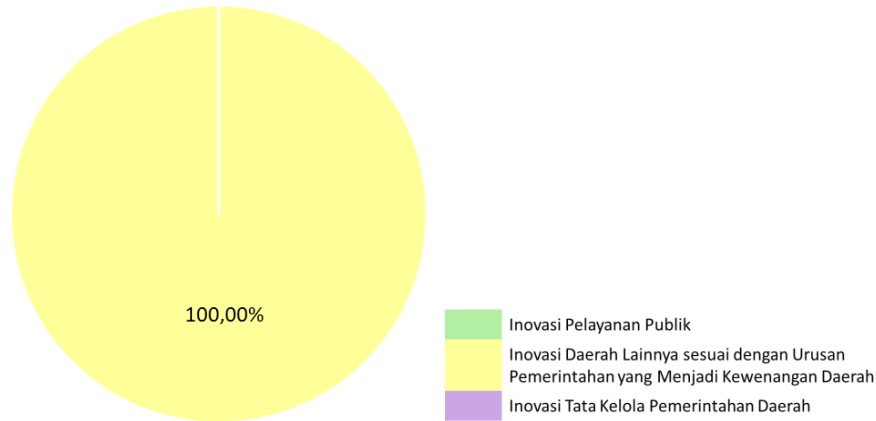
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamasa

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mamasa telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 1 (33.33%) inovasi dari 3 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 2 (66.67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

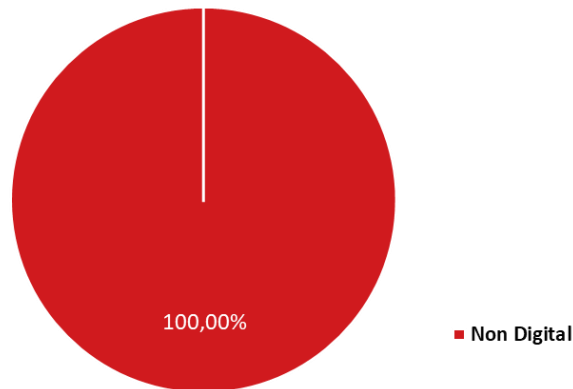
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamasa

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi di kabupaten Mamasa merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### c. Berdasarkan Jenis Inovasi

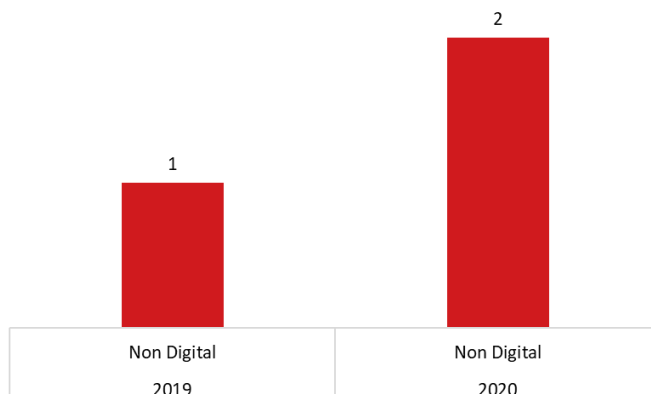


Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamasa

Seluruh inovasi di Kabupaten Mamasa pada tahun penilaian 2021 merupakan inovasi dengan jenis inovasi non digital.



#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

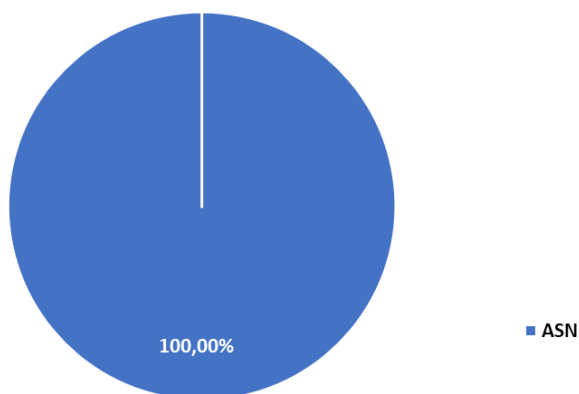


Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamasa

Inovasi non digital di Kabupaten Mamasa meningkat 2 kali lipat di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan total jumlah inovasi dari dua tahun tersebut adalah 3 inovasi non digital.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

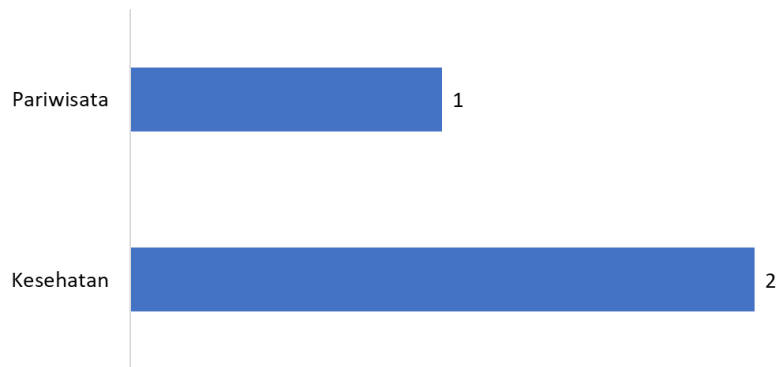
Seluruh inovasi di Kabupaten Mamasa pada masa laporan tahun 2021 diinisiasi oleh ASN. Berdasarkan laporan tahun 2021 belum ada inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, OPD, DPRD, dan Masyarakat.



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mamasa

#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

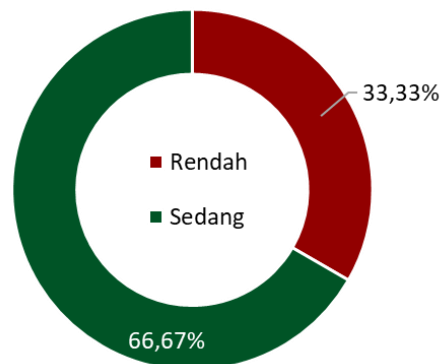
Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Mamasa berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari dua urusan yakni urusan Pariwisata dan Kesehatan. Satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mamasa merupakan inovasi dalam urusan pariwisata dan dua inovasi lainnya merupakan urusan kesehatan.



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamasa

### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi di Kabupaten Mamasa mencapai skor kematangan rendah dan sedang. Terdapat dua inovasi (66.67%) yang sudah memiliki skor kematangan dengan kategori sedang dan satu inovasi (33.33%) memiliki skor kematangan dengan kategori kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.



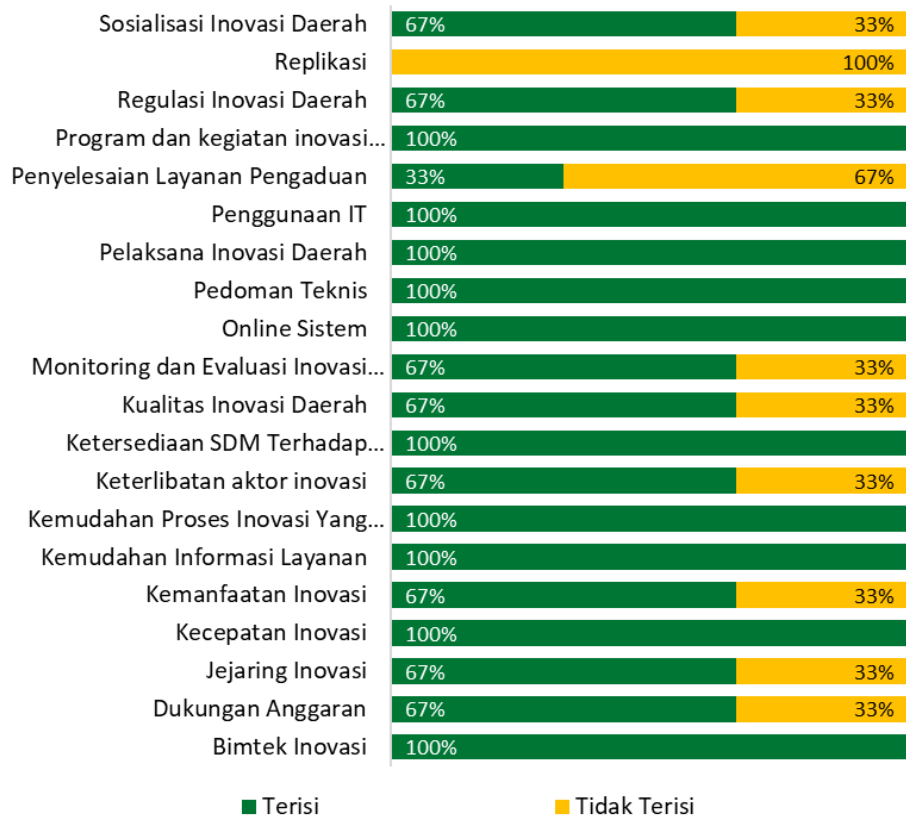
Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamasa

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung dalam indikator satuan inovasi daerah, terdapat beberapa indikator yang tingkat keterisiannya 100% dan ada satu indikator yang terisi data dukungunya seluruh inovasi.

Indikator program dan kegiatan inovasi perangkat daerah, penggunaan IT, pelaksana inovasi daerah, pedoman teknis, online system, kemudahan proses inovasi, kemudahan informasi layanan, kecepatan inovasi dan bimtek inovasi merupakan indikator-indikator yang data dukungunya terisi 100%. Atau dapat dikatakan bahwa seluruh inovasi di Kabupaten Mamasa melampirkan data dukung dalam indikator-indikator tersebut. Sedangkan, satu indikator yang tidak terisi oleh data dukung sama sekali adalah indikator replikasi. Hal ini menunjukkan

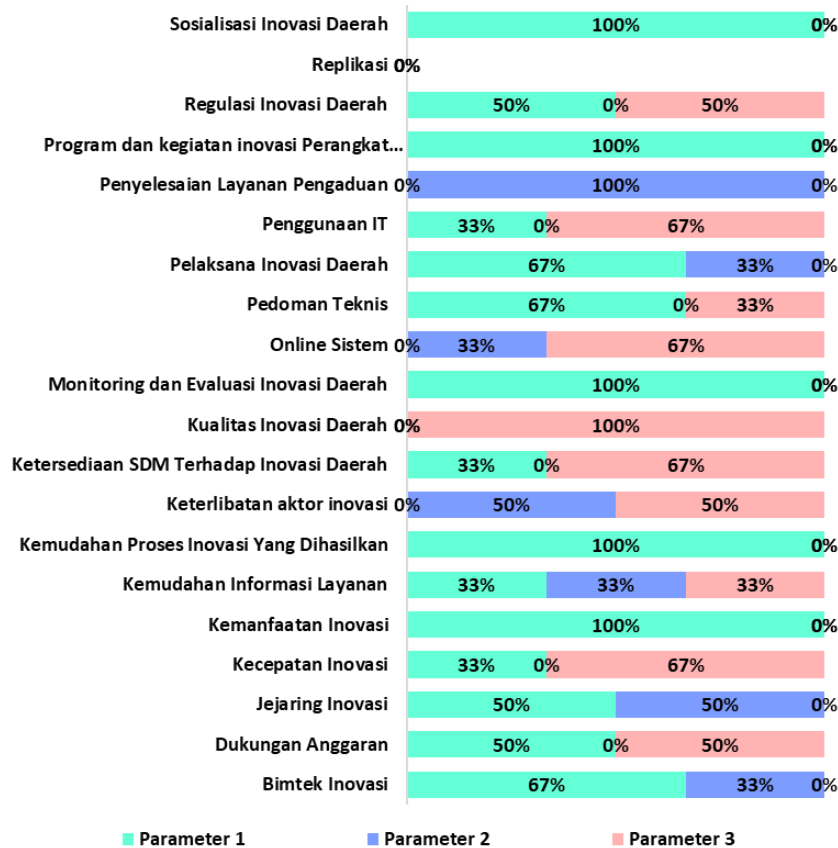
bahwa seluruh inovasi di Kabupaten Mamasa belum direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya. Selain indikator-indikator yang sudah disebutkan di atas, indikator lainnya memiliki persentase tingkat keterisian sebesar 66.67% sehingga 2 dari 3 inovasi sudah melampirkan data dukung untuk indikator-indikator tersebut.



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamasa

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Indikator satuan inovasi daerah memiliki parameter yang dapat menentukan nilai sebuah inovasi. Di Kabupaten Mamasa, dari 16 indikator satuan inovasi daerah, indikator yang bernilai parameter tiga untuk seluruh inovasi yang mengisi data dukung adalah indikator kualitas inovasi daerah. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian parameter 3 lebih dari atau sama dengan 50% adalah indikator regulasi inovasi daerah, penggunaan IT, online sistem, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, keterlibatan aktor inovasi, kecepatan inovasi, dan dukungan anggaran. Indikator layanan pengaduan adalah indikator yang seluruh inovasinya memiliki nilai parameter 2.



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Indikator yang seluruh inovasinya memiliki nilai parameter satu adalah indikator sosialisasi inovasi daerah, program dan kegiatan inovasi perangkat daerah, monitoring dan evaluasi inovasi daerah, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, dan kemanfaatan inovasi. Sedangkan indikator yang data dukung inovasinya 50% atau lebih bernilai parameter satu adalah indikator regulasi inovasi daerah, pelaksana inovasi daerah, pedoman teknis, jejaring inovasi, dukungan anggaran, dan bimtek inovasi.

#### j. Daftar Inovasi Kabupaten Mamasa beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Mamasa beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi Perencanaan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	2
KELAS PENGANTIN SEHAT	75
Desa Wisata Anggrek (DEWI ANGGREK)	95

## C. KABUPATEN MAMUJU

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

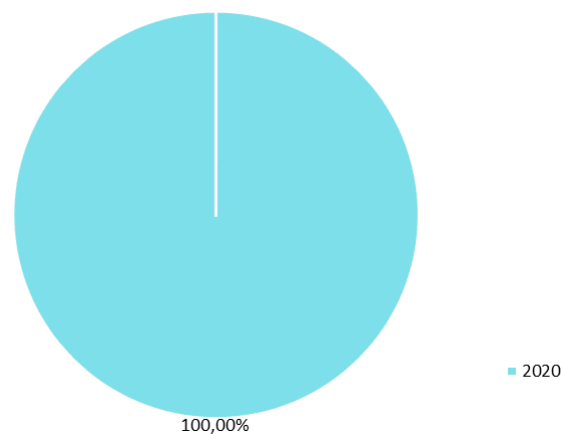
Pada Laporan Inovasi Daerah tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tidak menginput aspek satuan pemerintah daerah, sehingga pada grafik capaian di Gambar 23 seluruh indikator bernilai 0.



Gambar 23. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamuju

### 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

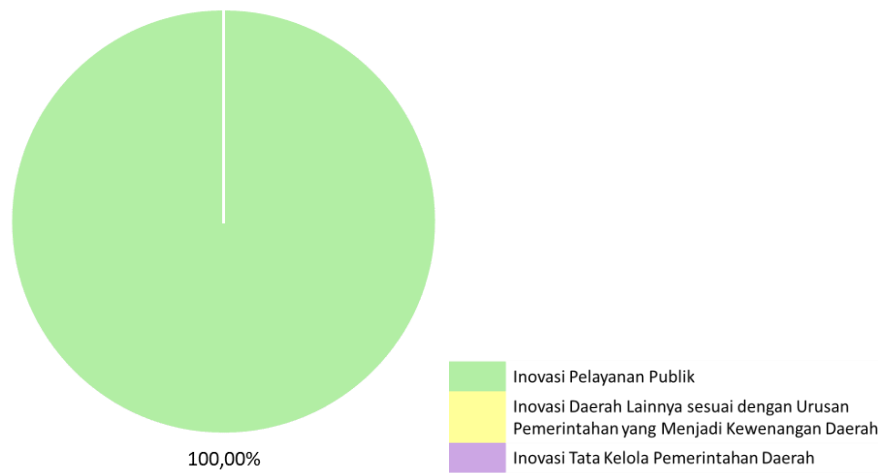
#### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamuju

Satu inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Mamuju merupakan inovasi yang diterapkan di tahun 2020

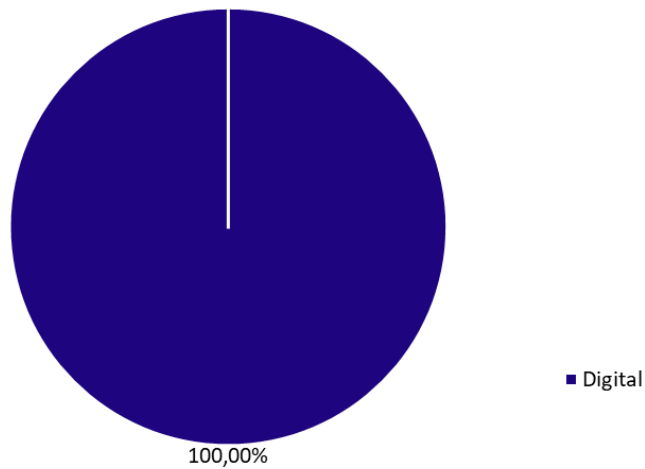
**b. Berdasarkan Bentuk Inovasi**



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamuju

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi di kabupaten Mamuju merupakan inovasi pelayanan publik.

**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**

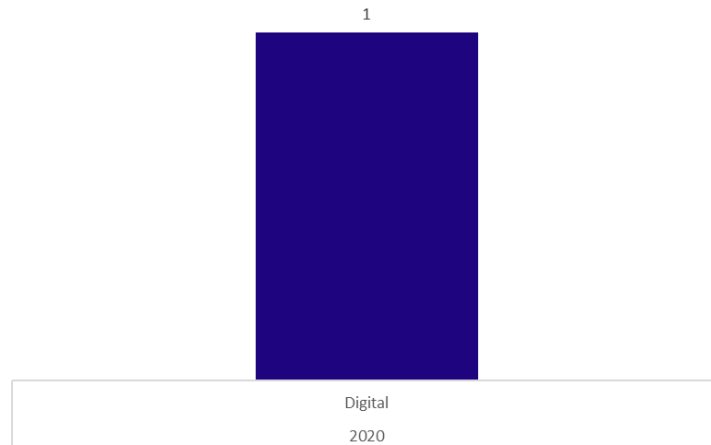


Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamuju

Seluruh inovasi di Kabupaten Mamuju pada tahun penilaian 2021 merupakan inovasi dengan jenis inovasi digital.

**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**

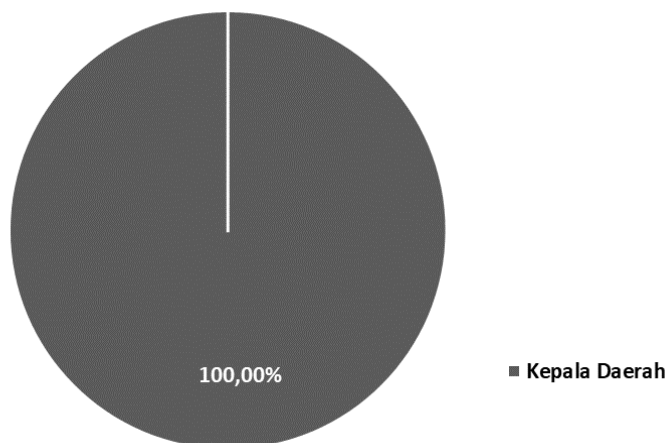
Inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Mamuju di tahun 2021 hanya satu Inovasi digital di tahun 2020 tanpa ada inovasi di tahun sebelumnya.



Gambar 27. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamuju

**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**

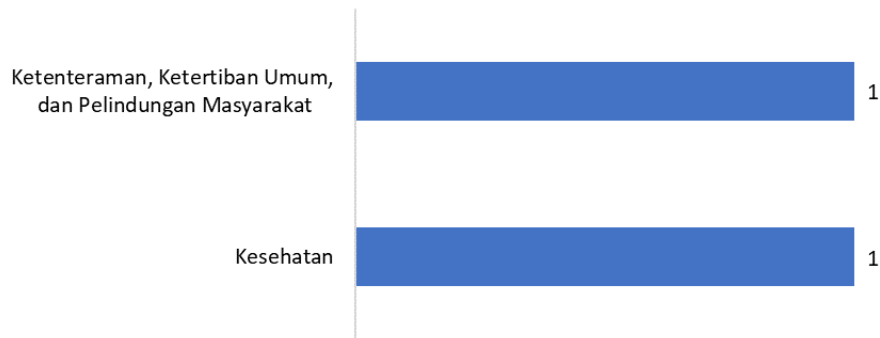
Seluruh inovasi di Kabupaten Mamasa pada masa laporan tahun 2021 diinisiasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan laporan tahun 2021 belum ada inovasi yang diinisiasi oleh ASN, OPD, DPRD, dan Masyarakat.



Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mamuju

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

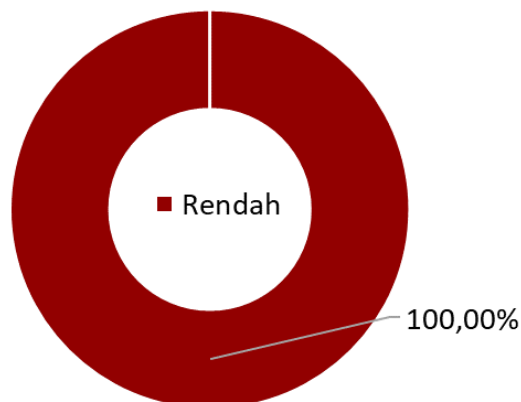
Satu inovasi daerah yang dilaporkan pada indeks inovasi daerah tahun 2021 di Kabupaten Mamuju masuk ke dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan urusan Kesehatan.



Gambar 29. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamuju

#### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi di Kabupaten Mamuju mencapai skor kematangan rendah dengan skor kematangan dibawah 50.

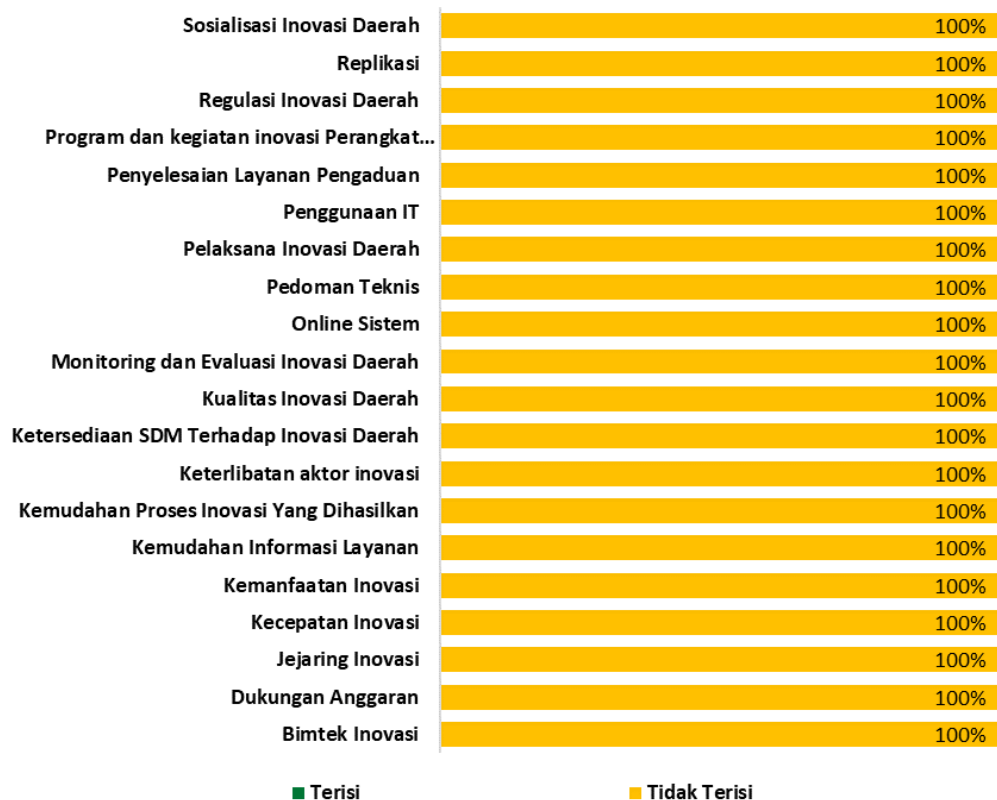


Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamuju

#### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Seluruh inovasi di Kabupaten Mamuju pada masa penilaian 2021 tidak dilengkapi oleh data dukung.





Gambar 31. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**

Berdasarkan poin sebelumnya, dikarenakan tidak ada data dukung yang melengkapi satuan inovasi daerah di Kabupaten Mamuju maka parameter di indikator satuan inovasi daerah juga tidak terisi.

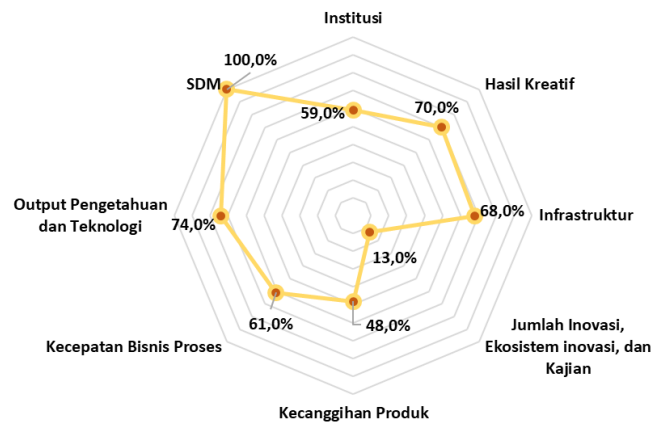
**j. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju beserta Skor Kematangannya**

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Mamuju Matottong (Mamuju Kuat)	0

**D. KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah, Kabupaten Mamuju Tengah memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 100.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor yang mencapai skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian cukup rendah, yaitu 13.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.



Gambar 32. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

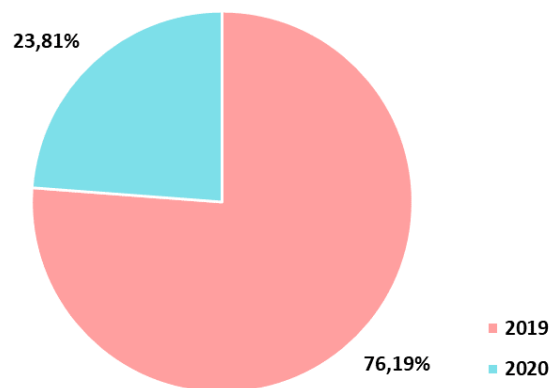
Aspek satuan pemerintah daerah di dalam Laporan Inovasi Daerah tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan yang terlalu terlihat di Kabupaten Mamuju Tengah. Capaian setiap indikator di daerah ini cenderung stagnan dengan capaian kurang dari satu persen. Jumlah pendapatan perkapita di Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu indikator yang mengalami penurunan capaian dengan persentase penurunan jumlah pendapatan perkapita mencapai 1.45%. Penurunan ini masih dibawah penurunan standar nasional yang mencapai 1.85%. Selain jumlah pendapatan perkapita, PAD di Kabupaten Mamuju Tengah juga mengalami penurunan sebesar 0.03% dengan standar nasional yang naik 8%. Satu-satunya indikator yang terlihat mengalami peningkatan di aspek satuan pemda Kabupaten Mamuju Tengah adalah indikator kualitas peningkatan perizinan yang naik sebesar 31.85%.



Gambar 33. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

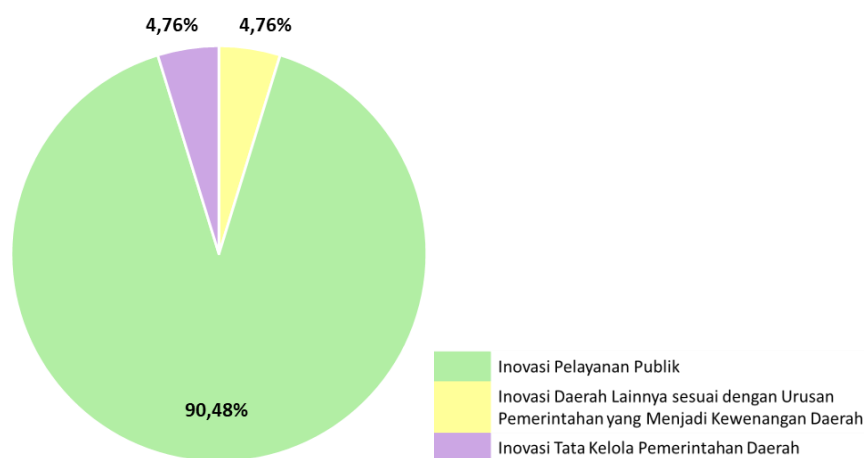
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 34. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mamuju Tengah telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 16 (76.19%) inovasi dari 21 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 5 (23.81%) inovasi lainnya diterapkan di tahun 2020.

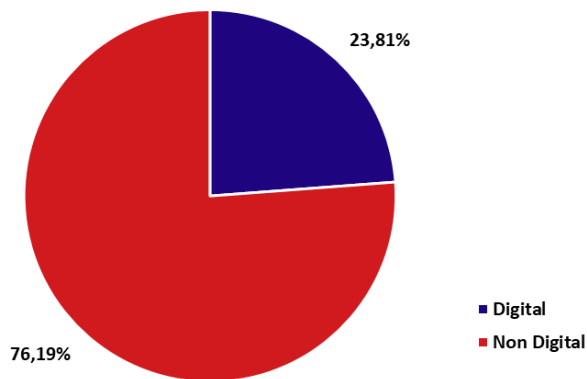
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

Berdasarkan bentuk inovasi, lebih dari 90% inovasi yakni sebanyak 19 inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah adalah inovasi pelayanan publik. Sedangkan 2 inovasi lainnya masing-masing merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

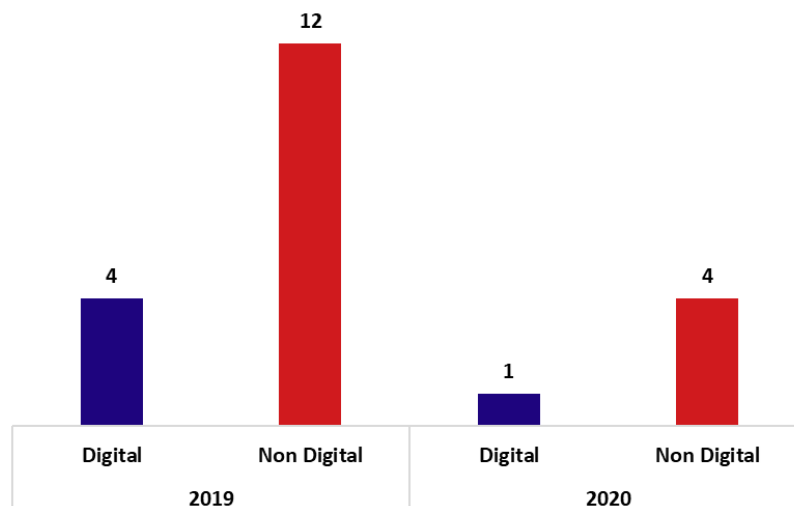
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

Inovasi di Kabupaten Mamuju tengah terdiri dari 16 (76.19%) inovasi non digital dan 5 (23.81%) inovasi digital.

### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

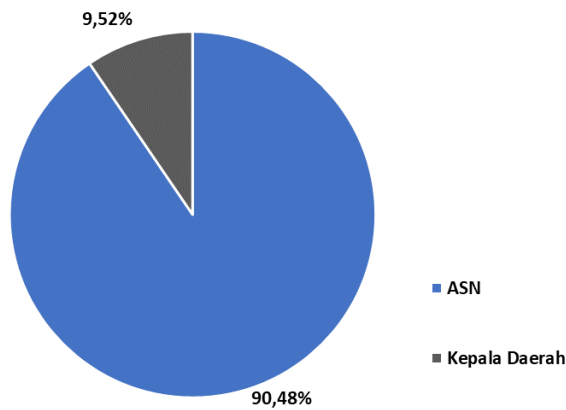


Gambar 37. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamuju Tengah

Secara umum, jumlah inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Penurunan jumlah inovasi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mencapai 70% pada inovasi non digital dan 75% pada inovasi digital. Inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan inovasi digital di tahun yang sama. Sedangkan pada tahun 2020, inovasi non digital 4 kali lebih banyak dibandingkan inovasi digital di tahun yang sama.

### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

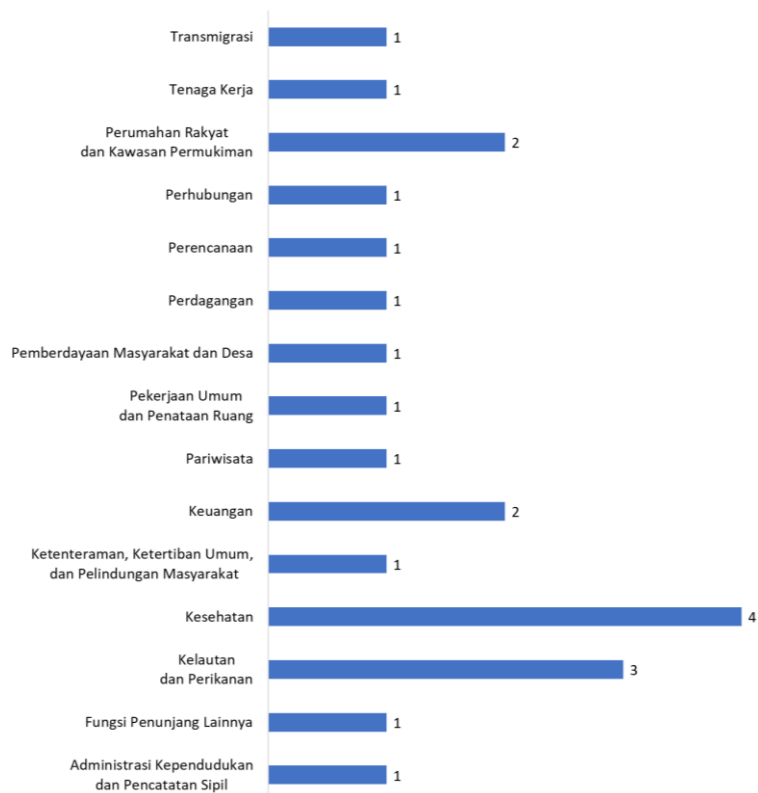
Inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah pada masa laporan tahun 2021 diinisiasi oleh ASN sebesar 90.48% dan 9.52% lainnya oleh Kepala Daerah. Belum ada inovasi yang diinisiasikan oleh OPD, DPRD, dan Masyarakat.



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mamuju Tengah

#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

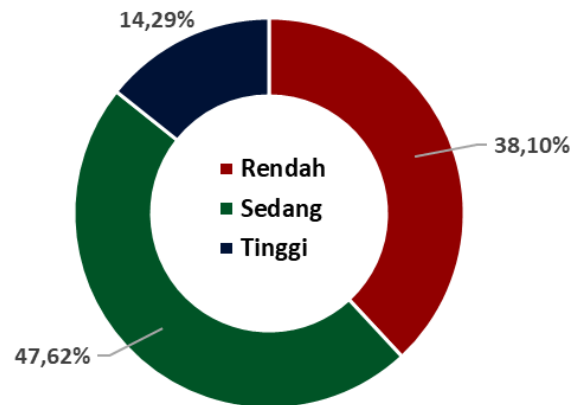
Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari lima belas urusan dengan jumlah inovasi paling banyak merupakan inovasi dalam urusan kesehatan. Terdapat empat inovasi yang termasuk dalam urusan kesehatan. Urusan dengan jumlah inovasi terbanyak selanjutnya adalah inovasi dalam urusan kelautan dan perikanan, dengan 3 inovasi yang termasuk di dalamnya. Selain dua urusan pemerintah tersebut, terdapat dua urusan pemerintah lainnya yang inovasinya berjumlah lebih dari satu di Kabupaten Mamuju Tengah. Urusan pemerintah tersebut adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan keuangan. Daftar urusan lainnya yang terdapat inovasinya di Kabupaten Mamuju Tengah diilustrasikan dalam Gambar 39.



Gambar 39. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamuju Tengah

### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

Inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaporkan pada tahun 2021 memiliki tingkat skor kematangan dari kategori rendah sampai dengan kategori tinggi. Hampir 50% inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tingkat skor kematangan inovasi sedang. Sepuluh inovasi yang memiliki skor kematangan sedang tersebut memiliki skor kematangan antara 50 – 100. Sebanyak 14.29% inovasi atau hanya 3 inovasi saja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memiliki kategori skor inovasi tinggi dengan skor kematangan di atas 100. Sedangkan 8 inovasi lainnya atau sebesar 38.10% memiliki kategori skor kematangan rendah dengan skor kematangan kurang dari 50.

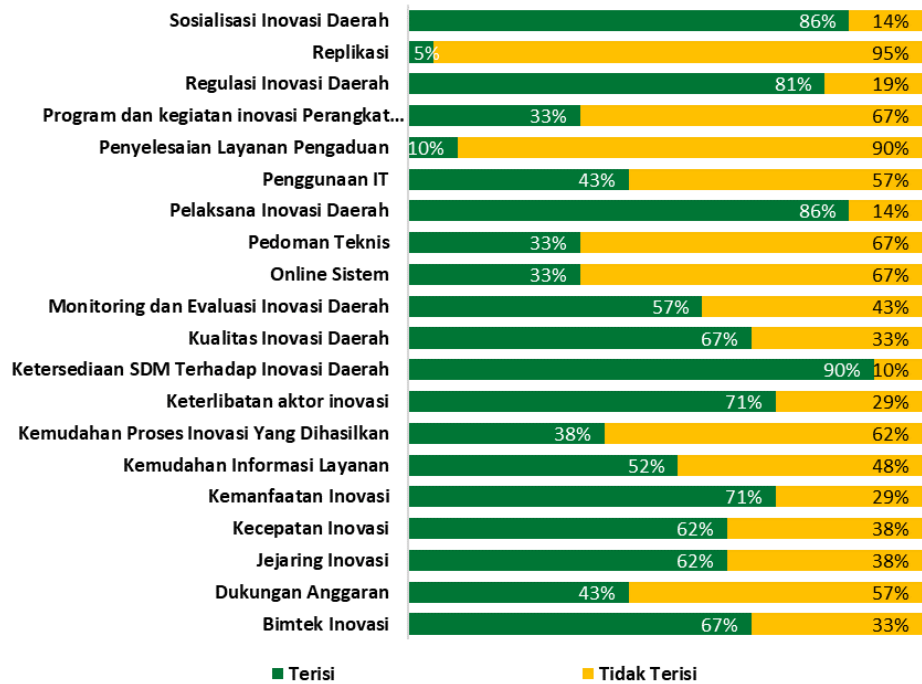


Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamuju Tengah

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung dalam indikator satuan inovasi daerah, di Kabupaten Mamuju Tengah tidak ada indikator yang terisi 100% data dukungannya. Indikator ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah adalah indikator yang memiliki persentase paling tinggi terisi data dukungannya. Persentase inovasi yang melampirkan data dukung untuk indikator ini sebesar 90% dari keseluruhan inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan indikator yang tingkat keterisiannya data dukungannya lebih dari 70% adalah indikator sosialisasi inovasi daerah, regulasi inovasi daerah, pelaksana inovasi daerah, keterlibatan aktor inovasi dan kemanfaatan inovasi.

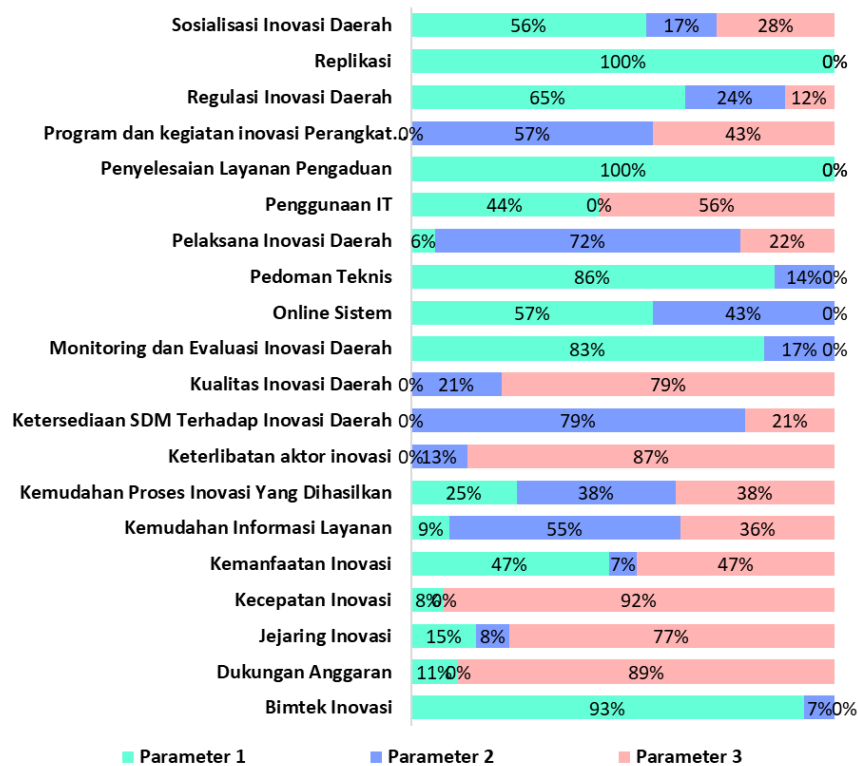
Indikator yang tingkat keterisian data dukungannya paling rendah adalah indikator replikasi. Hanya 5% inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah yang memiliki data dukung untuk indikator replikasi. Indikator lainnya yang memiliki tingkat keterisian data dukung yang rendah adalah indikator penyelesaian pelayanan pengaduan dengan persentase keterisian data dukung adalah 10%. Selanjutnya, indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung yang antara 10% - 50% adalah program dan kegiatan inovasi perangkat daerah dalam RKPd, penggunaan IT, pedoman teknis, online sistem, kemudahan inovasi yang dihasilkan, dan dukungan anggaran. Sedangkan persentase keterisian data dukung indikator satuan inovasi daerah di Kabupaten Mamuju Tengah lainnya dapat dilihat dalam Gambar 41.



Gambar 41. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Indikator satuan inovasi daerah memiliki parameter yang dapat menentukan nilai sebuah inovasi. Di Kabupaten Mamuju Tengah, dari 16 indikator satuan inovasi daerah, indikator yang bernilai parameter satu untuk seluruh inovasi yang mengisi data dukung adalah indikator replikasi dan penyelesaian pengaduan. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian parameter satu antara 50% sampai 100% adalah indikator sosialisasi inovasi daerah, regulasi inovasi daerah, pedoman teknis, online sistem, monitoring dan evaluasi inovasi daerah, dan bimtek inovasi. Sedangkan indikator satuan inovasi daerah yang memiliki nilai parameter 2 lebih dari 50% adalah indikator program dan kegiatan inovasi perangkat daerah dalam RKPd, pelaksana inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan kemudahan informasi layanan.



Gambar 42. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Indikator yang 50% atau lebih inovasinya memiliki nilai parameter tiga adalah indikator penggunaan IT, kualitas inovasi daerah, keterlibatan aktor inovasi, kecepatan inovasi, jejaring social, dan dukungan anggaran.

#### j. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju Tengah beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju Tengah beserta Skor Kematangannya

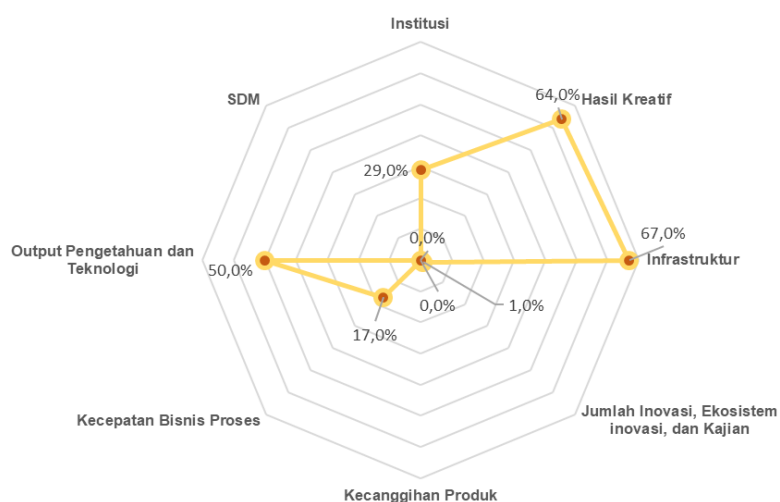
Nama Inovasi	Skor Kematangan
INOVASI DAERAH NEW NORMAL PASARTA' (Kolaborasi Pasar Tradisional dengan Aplikasi Pasarta')	0
Kampung Kumuh Berbenah Untuk Indonesia (KAMU BISA)	39
DUKCAPIL GO ONLINE	100
SI ABANG BERBAGI (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Web-GIS)	103
MEMBANGUN RUMAH RAKYAT (MEMBARA)	101
Parkir Kejujuran	47
Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (GERMAS DARZI)	90
- Perduhi Mama dan Bayi (PERMADANI)	62
KARTINI MENGGAPAI EMAS	65
Menuju generasi terbaik bangsa Dengan Imunisasi Dasar Lengkap Dan Lanjutan (Menuju Gerbang Dinda Lela)	56
PPK Sepakat "Sistem Pencairan Anggaran dengan Kepekatan	28



Nama Inovasi	Skor Kematangan
Bersama"	
Hei Gais "Home Industri Gaet Wisatawan"	72
Zony 100 San Pahlawan Ta'	6
"BERBUDI KOI" Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui koperasi on line	10
"Biduan Dikawal" budidaya udang didalam wadah kolam terpal	11
"Surimi Barakuda" Peningkatan Nilai Ekonomis Ikan Barakuda Berbasis Kelompok Pengolah	19
EMBUNG PESONA DESAKU	61
IMB MULTYPAYMENT	90
Si Lincih "Sistem Layanan Pencairan Tanpa Hambatan"	98
SESTANA (Sekolah Tangguh Bencana)	87
PAMBERS	59

## E. KABUPATEN MAMUJU UTARA (PASANGKAYU)

Secara umum, nilai pada masing-masing variabel ukur indeks inovasi daerah di Kabupaten Mamuju Utara cukup rendah. Skor tertinggi variable ukur indeks inovasi daerah di Kabupaten Mamuju Utara dicapai oleh variabel Infrastruktur dengan nilai 67.0%. Sedangkan skor terendahnya terdapat dalam variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, SDM, dan Kecanggihan Produk dengan nilai yang cukup rendah yaitu berkisar antara 0% - 1.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.



Gambar 43. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mamuju Utara

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

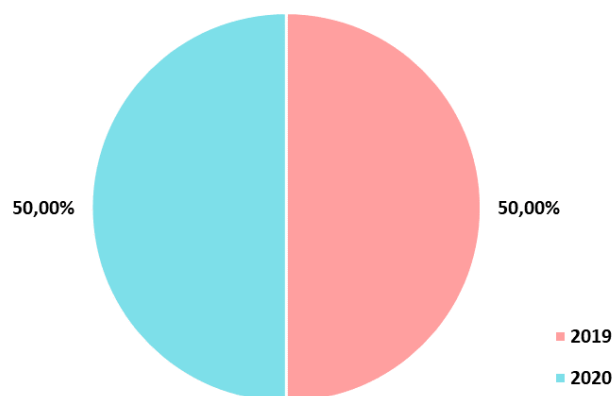
Aspek satuan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara di dalam Laporan Inovasi Daerah tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan di beberapa indikator dalam aspek ini. Perubahan yang terjadi di Kabupaten Mamuju Utara dalam aspek satuan pemda adalah indikator kualitas peningkatan perizinan dan jumlah pendapatan perkapita. Dua indikator tersebut mengalami penurunan capaian terutama pada indikator kualitas peningkatan perizinan. Penurunan kualitas peningkatan perizinan di Kabupaten Mamuju Utara mencapai 20.98%, sedangkan berdasarkan standar nasional indeks inovasi daerah kualitas peningkatan perizinan meningkat sebesar 5%. Indikator lainnya yang mengalami penurunan capaian adalah jumlah pendapatan perkapita, penurunan capaian indikator ini mencapai 3.11%. Apabila dibandingkan dengan standar nasional indeks inovasi daerah, jumlah pendapatan perkapita di Kabupaten Mamuju Utara mengalami persentase penurunan 1.26 poin lebih besar.



Gambar 44. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mamuju Utara

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

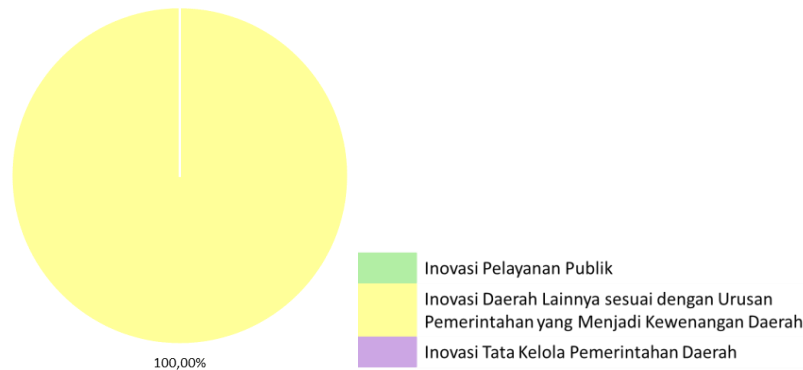
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 45. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mamuju Utara terbagi menjadi dua sama besar di tahun 2019 dan 2020. Satu inovasi mulai diterapkan di tahun 2019 dan satu inovasi lainnya diterapkan di tahun 2020.

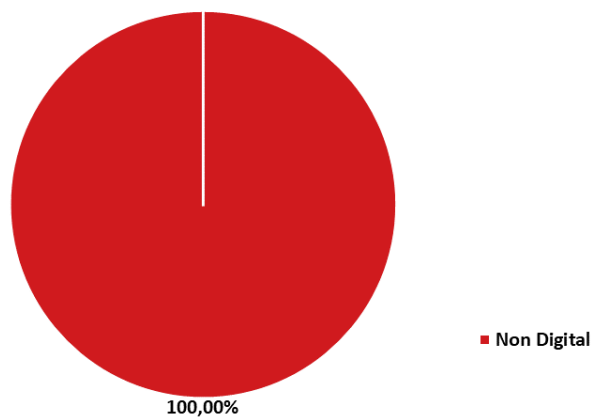
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi di Kabupaten Mamuju Utara adalah inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

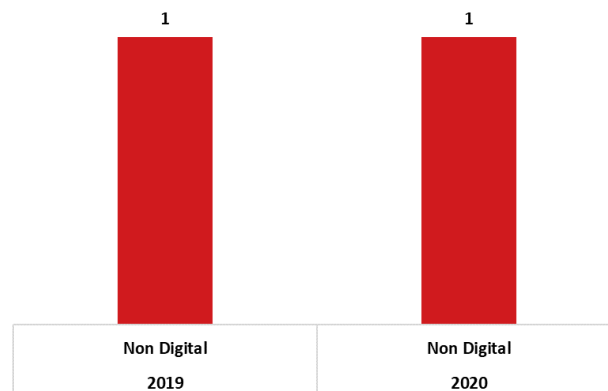
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

Seluruh inovasi di Kabupaten Mamuju Utara merupakan inovasi non digital.

#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

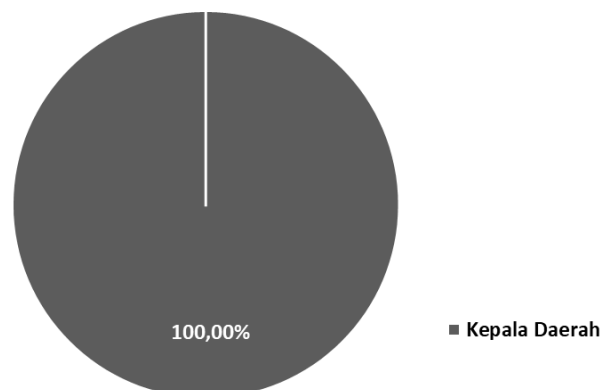


Gambar 48. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mamuju Utara

Jumlah inovasi di Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2019 sama dengan tahun 2020 dengan jenis inovasi yang sama, yakni inovasi non digital.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

Inovasi di Kabupaten Mamuju Utara pada masa laporan tahun 2021 seluruhnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Belum ada inovasi yang diinisiasikan oleh ASN, OPD, DPRD, dan Masyarakat.



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mamuju Utara

#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

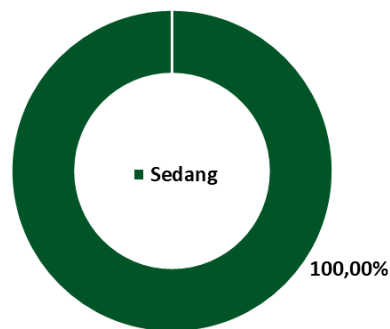
Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari dua urusan yakni satu urusan pertanian dan satu urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.



Gambar 50. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mamuju Utara

### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

Seluruh novasi di Kabupaten Mamuju Utara yang dilaporkan pada tahun 2021 memiliki tingkat skor kematangan kategori rendah dengan skor kematangan antara 50 – 100.



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mamuju Utara

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Tidak terdapat data pada poin ini pada laporan inovasi daerah tahun 2021 di Kabupaten Mamuju Utara.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Tidak terdapat data pada poin ini pada laporan inovasi daerah tahun 2021 di Kabupaten Mamuju Utara.

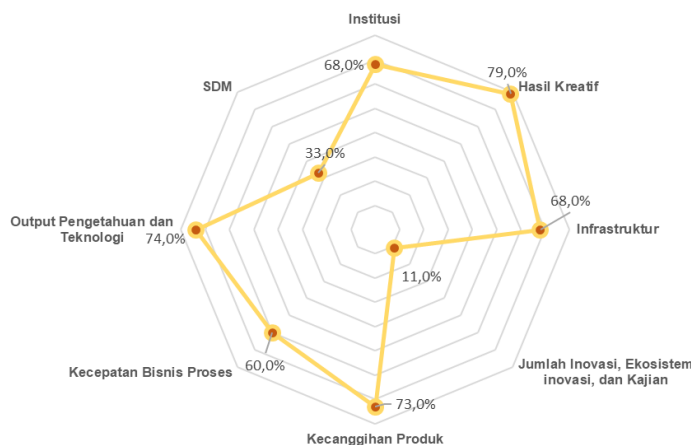
### j. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Mamuju Utara beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
PENGEMBANGAN KAMPUNG PEDAS	71
Pengembangan desa dengan wirausaha (BANGSA DEWA) melalui One Village One Entrepreneurship (OVOE)	64

## F. KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah, Kabupaten Polewali Mandar memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 79.0%. Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian cukup rendah, yaitu 11.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.



Gambar 52. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Polewali Mandar

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

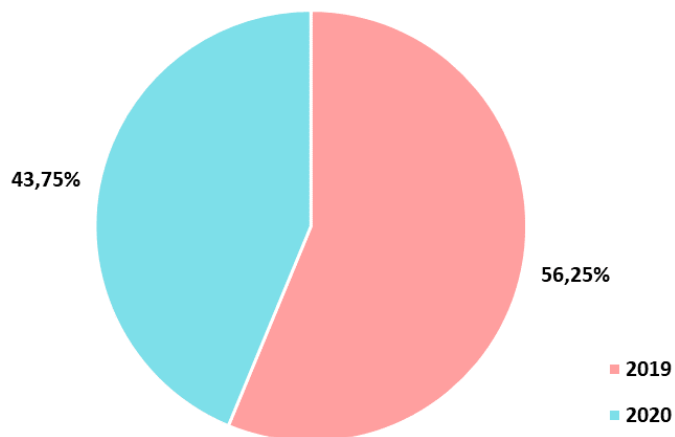
Aspek satuan pemerintah daerah di dalam Laporan Inovasi Daerah tahun 2021 Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang mengalami penurunan capaian, satu indikator mengalami peningkatan dan tiga indikator lainnya tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Indikator jumlah peningkatan PAD adalah satu-satunya indikator yang mengalami peningkatan capaian dengan peningkatan capaian yang sebesar 22.04%. Sedangkan penurunan capaian terbesar adalah indikator jumlah peningkatan investasi. Penurunan jumlah peningkatan investasi di kabupaten Polewali Mandar mencapai 84.03%. Hal ini bersamaan dengan penurunan kualitas peningkatan perizinan sebesar 35.15% dan penurunan jumlah pendapatan perkapita sebesar 1.41%. Selain itu, indikator dalam aspek satuan pemda kabupaten Polewali Mandar yang cukup stagnan adalah tingkat pengangguran terbuka, penurunan angka kemiskinan dan IPM. Tiga indikator tersebut mengalami perubahan kurang dari 1% sehingga tidak terlalu terlihat perubahannya.



Gambar 53. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Polewali Mandar

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

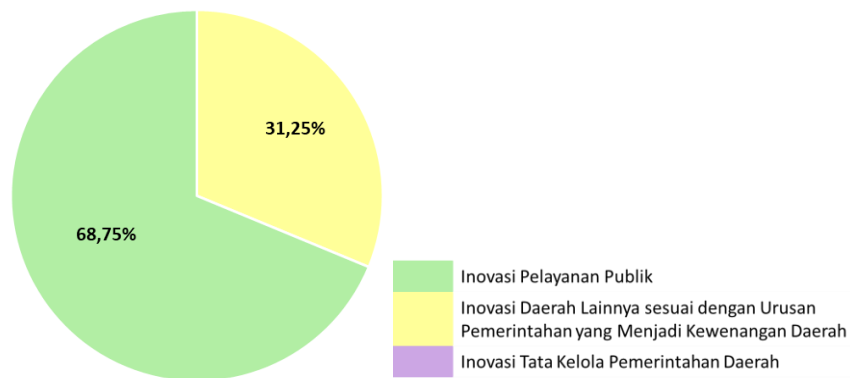
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 54. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Polewali Mandar telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 9 (56.25%) inovasi dari 16 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 7 (43.75%) inovasi lainnya diterapkan di tahun 2020.

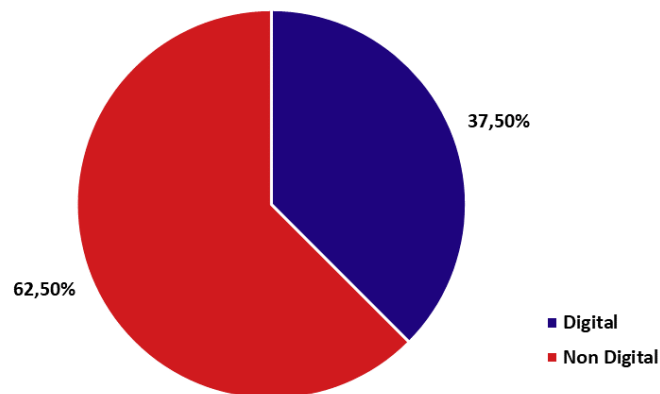
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan bentuk inovasi, sebanyak 11 (68.75%) inovasi di Kabupaten Polewali Mandar adalah inovasi pelayanan publik. Sedangkan 5 (31.25%) inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### c. Berdasarkan Jenis Inovasi

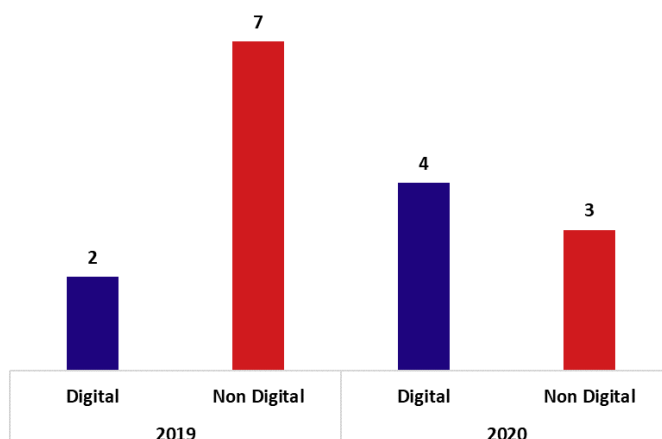


Gambar 56. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

Inovasi di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 10 (62.50%) inovasi non digital dan 6 (37.50%) inovasi digital.



#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

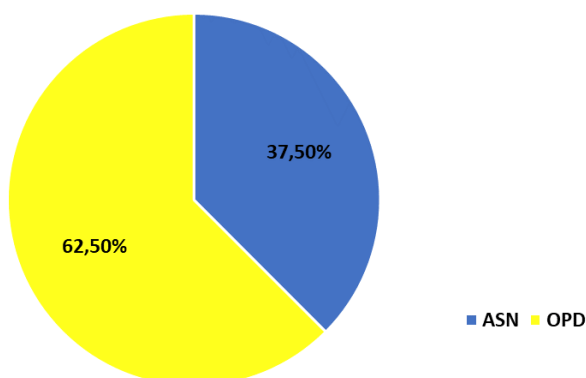


Gambar 57. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Polewali Mandar

Secara umum, jumlah inovasi di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun 2020 terutama pada inovasi non digital. Sedangkan inovasi digital di kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan. Penurunan jumlah inovasi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 pada inovasi non digital mencapai 57%, sedangkan inovasi digitalnya meningkat 100%.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

Inovasi di Kabupaten Polewali Mandar pada masa laporan tahun 2021 diinisiasi oleh OPD sebesar 62.50% dan 37.50% lainnya oleh ASN. Belum ada inovasi yang diinisiasikan oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat.

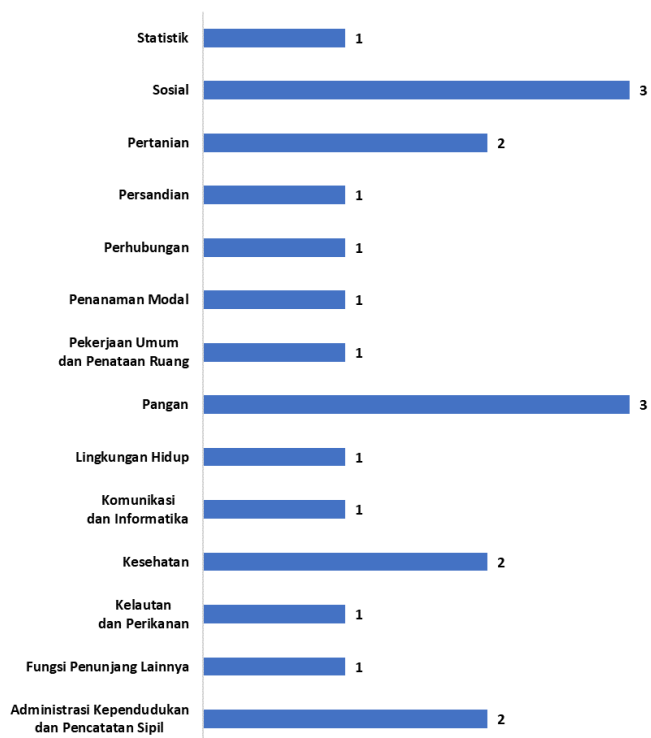


Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Polewali Mandar

#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari empat belas urusan dengan jumlah inovasi paling banyak merupakan inovasi dalam urusan sosial dan urusan pangan dengan jumlah inovasi di masing-masing urusan adalah dua inovasi. Selain dua urusan tersebut, urusan pemerintah lain yang memiliki jumlah inovasi per urusan lebih dari satu adalah urusan pertanian, kesehatan dan

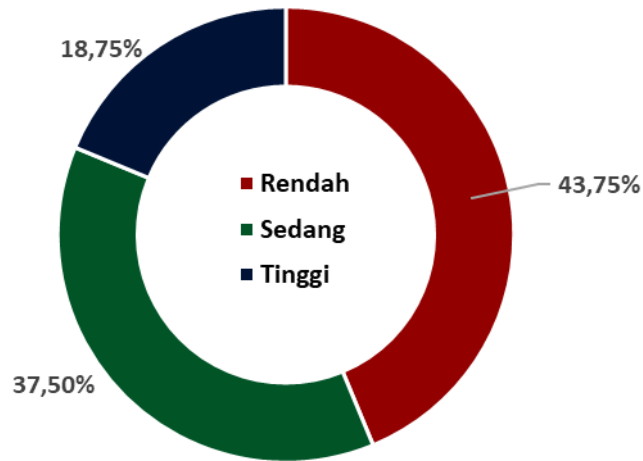
adminduk. Sedangkan sembilan urusan lainnya memiliki satu inovasi di masing-masing urusan. Detail urusan pemerintah di kabupaten Polewali Mandar yang memiliki inovasi dapat dilihat dalam Gambar 59.



Gambar 59. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Polewali Mandar

### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

Inovasi di Kabupaten Polewali Mandar yang dilaporkan pada tahun 2021 memiliki tingkat skor kematangan dari kategori rendah sampai dengan kategori tinggi. Sebanyak 18.75% inovasi di Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat skor kematangan inovasi tinggi. Tiga inovasi yang memiliki skor kematangan tinggi tersebut memiliki skor kematangan lebih dari 100. Sebanyak 37.50% inovasi atau sejumlah 6 inovasi di Kabupaten Polewali Mandar memiliki kategori skor inovasi sedang dengan skor kematangan antara 50 – 100. Sedangkan 7 inovasi lainnya atau sebesar 43.75% memiliki kategori skor kematangan rendah dengan skor kematangan kurang dari 50.

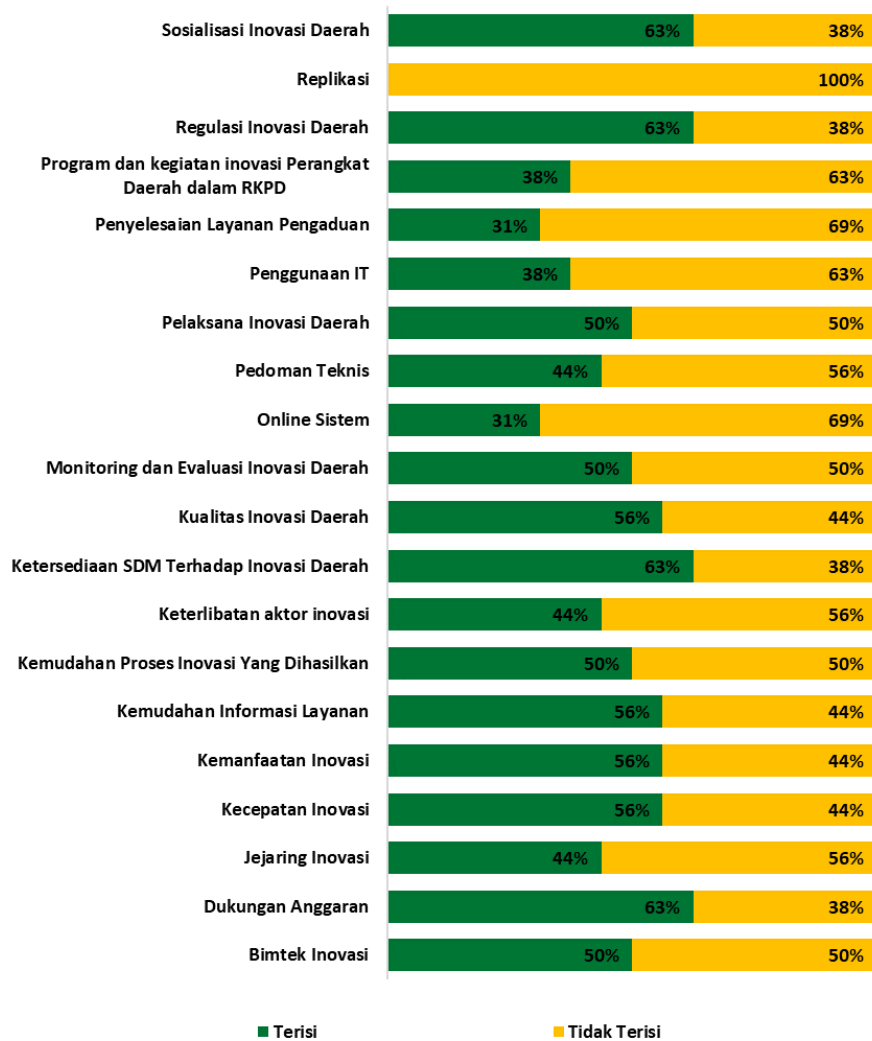


Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Polewali Mandar

#### **h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung dalam indikator satuan inovasi daerah, di Kabupaten Polewali Mandar tidak ada indikator yang terisi 100% data dukung inovasinya. Rata-rata keterisian data pendukung inovasi di dalam indikator satuan inovasi daerah kabupaten Polewali Mandar adalah 47.19%.

Indikator sosialisasi inovasi daerah, regulasi inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan dukungan anggaran adalah indikator-indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung tertinggi yakni sebesar 63%. Sedangkan indikator replikasi adalah indikator yang sama sekali tidak terisi oleh data dukung dari semua inovasi yang ada di kabupaten Polewali Mandar. Selain lima indikator yang sudah disebutkan di atas, indikator satuan inovasi daerah di Kabupaten Polewali Mandar terisi data dukungnya antara 31% - 56%. Data lengkap keterisian data dukung dalam indikator satuan inovasi daerah kabupaten Polewali Mandar disajikan dalam Gambar 61.

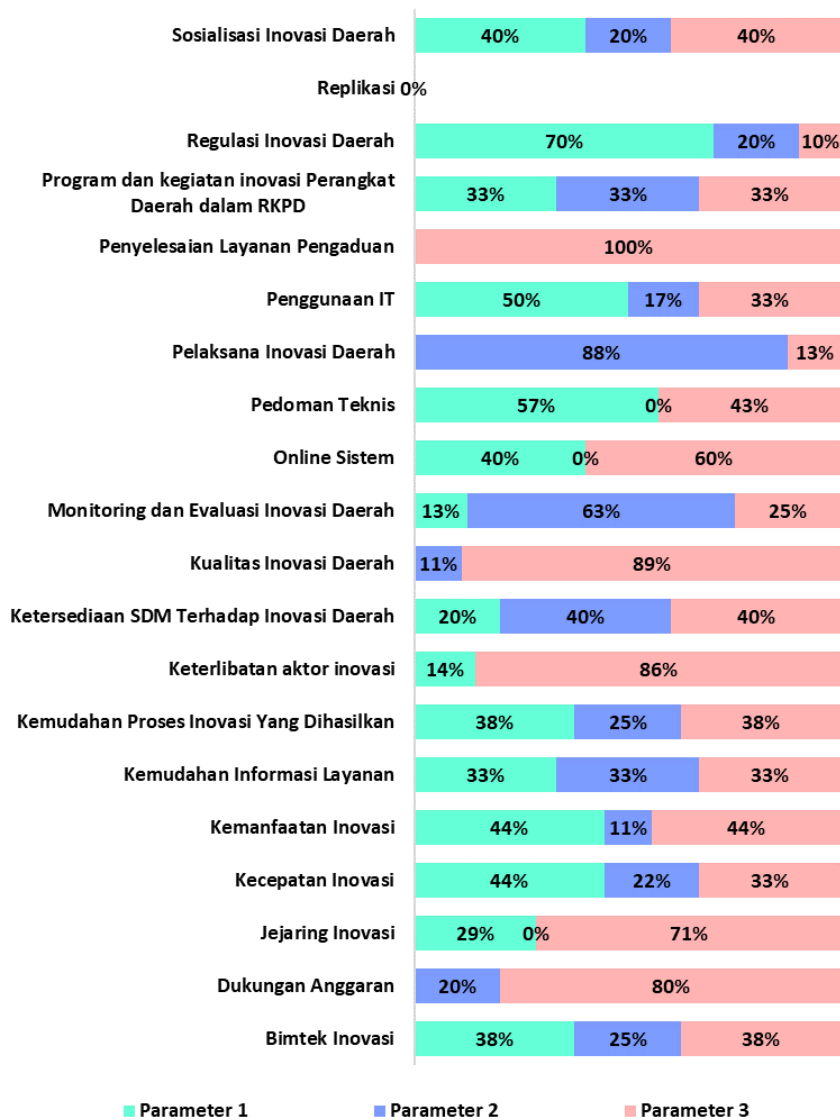


Gambar 61. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Indikator satuan inovasi daerah memiliki parameter yang dapat menentukan nilai sebuah inovasi. Di Kabupaten Polewali Mandar, dari 16 indikator satuan inovasi daerah, indikator yang bernilai parameter tiga untuk seluruh inovasi yang mengisi data dukung adalah indikator penyelesaian layanan pengaduan. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian parameter tiga antara 50% sampai 100% adalah indikator online system, kualitas inovasi daerah, keterlibatan aktor inovasi, jejaring inovasi dan dukungan anggaran.

Indikator yang memiliki tingkat keterisian parameter dua paling tinggi adalah indikator pelaksana inovasi daerah dengan persentase keterisian parameter dua sebesar 88%. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian parameter satu paling tinggi di kabupaten Polewali Mandar adalah indikator regulasi inovasi daerah.



Gambar 62. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Polewali Mandar beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Polewali Mandar beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SIMANTAP (Sistem Pertanian Mandiri Terpadu dan Partisipatif)	108
Aplikasi Web Polman Satu Data	104
PAS KENCANA (Percepatan Assesment Korban Bencana)	76
MASIGA MPP AIM (Mudah, Transparansi, dan Gampang Mall Pelayanan Pablik Anjungan Izin Masagena)	95
SCMU (Social Care Mobile Unit)	18
SEKOLAH PENGANTIN (Strategi Kelola Keluarga Sehat Melalui Pembelajaran Stunting Bagi Calon Pengantin)	102
SIMONTOK DESI (Sistem Informasi Manajemen Operasional Terpadu Organisasi Kepemudaan Dan Pemuda Potensi)	0

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Budidaya Air Tawar Konvensional Ke Teknologi Bioflok	0
MPKH (Model Pengembangan Kawasan Hortikultura)	79
JEKDUK (Jemput Antar Dokumen Administrasi Penduduk dan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan)	0
Inovasi Bank Sampah (IBaS) SIPAMANDAQ	99
SIAPPma' (Sistem Informasi Aplikasi Permukiman)	0
DUM DUUM (Darah Untuk Kemanusiaan Darah Untuk Ibu Melahirkan)	81
SIMPEDA (Sistem Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian)	0
KEBUN INSPIRASI AIM (AYO IKUT MENANAM)	71
NGEKIR ON LINE	0

# ***BAB III***

---

## ***PEMBAHASAN REKOMENDASI***





Pada Provinsi Sulawesi Barat terdapat 6 Kabupaten namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

#### **A. KABUPATEN MAJENE**

Kabupaten Majene memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 25,35 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Majene melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

#### **B. KABUPATEN MAMASA**

Kabupaten Mamasa memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 36,97 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Mamasa melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

#### **C. KABUPATEN MAMUJU**

Kabupaten Mamuju memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 0,08 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Mamuju melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

#### **D. KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 38,41 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Mamuju Tengah melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

#### **E. KABUPATEN MAMUJU UTARA (PASANGKAYU)**

Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 32,36 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

#### **F. KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kabupaten Polewali Mandar memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 35,91 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Polewali Mandar melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.